

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH : TINJAUAN SISTEMATIS

Niken Ardella Zamrizal*¹, Izzah Sholehah², Azzah Nabila³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

nikenardella29@gmail.com¹, sholihahizzah1101@gmail.com²,

azzahnabila15@gmail.com³

Diterima : 01 Juli 2025

Direvisi : 15 Juli 2025

Disetujui : 05-08- 2025

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki implementasi konsep keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri khas laporan keuangan syariah, mengevaluasi pengaruhnya terhadap pencapaian keterbukaan dan pertanggungjawaban, serta mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan menerapkan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) yang mengikuti panduan PRISMA dan analisis SPIDER, penelitian ini menganalisis publikasi dan praktik terkini di bidang keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa keadilan dan nilai-nilai etis merupakan inti dari pelaporan keuangan syariah, menjadikannya instrumen krusial untuk membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, kendala seperti kurangnya keseragaman standar global, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan kerumitan transaksi syariah masih menjadi penghalang. Oleh karena itu, penegakan regulasi yang lebih kuat dan peningkatan edukasi sangat esensial untuk mendukung peningkatan mutu laporan keuangan syariah.

Kata Kunci : Akuntabilitas ; Keterbukaan ; Tantangan ; Transparansi

ABSTRACT

This study investigates the implementation of the concept of openness and accountability in the preparation of financial statements based on sharia principles. The main focus of this study is to identify the distinctive characteristics of Islamic financial statements, evaluate their influence on the achievement of openness and accountability, and examine the challenges faced by Islamic Financial Institutions in upholding these principles. Applying the systematic literature review (SLR) method that follows the PRISMA guidelines and the SPIDER analysis, this study analyzes the latest publications and practices in the field of Islamic finance. The findings show that fairness and ethical values are at the heart of Islamic financial reporting, making them a crucial instrument for building trust through openness and accountability. However, obstacles such as the lack of uniformity of global standards, limited human resource competencies, and the complexity of sharia transactions remain barriers. Therefore, stronger regulatory enforcement and increased education are essential to support the improvement of the quality of Islamic financial statements.

Keywords: Accountability ; Openness; Challenge ; Transparency

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, penerapan akuntansi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menjamin bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kamal et al., 2025). Transparansi dan akuntabilitas, dalam perspektif Islam, memiliki signifikansi teologis yang mendalam. Manusia ditempatkan sebagai khalifatullah fi al-ard (wakil Tuhan di bumi), yaitu, ia dipercayakan dengan kepercayaan ilahi untuk memerintah dan memakmurkan bumi demi menyebarkan belas kasihan kepada seluruh alam.

Kepercayaan ini menyiratkan bahwa otoritas yang dimiliki manusia bukanlah kepemilikan mutlak tetapi, pada kenyataannya, kepercayaan kepada Tuhan. Dengan demikian, semua pekerjaan dan fasilitas manusia di bawah kendalinya akan bertanggung jawab di hadapannya di masa depan. Tauhid adalah pilar utama

akuntabilitas Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan penguasa dunia. Tauhid juga melibatkan pengakuan hak untuk menyembah dan mentaati Allah SWT, dan diberi posisi utama dalam menitip kekuasaannya atas bumi kepada manusia, pencipta alam semesta dan pemilik segala isinya (Rahmatilla & Ali, 2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ekonomi Islam menjalankan fungsi yang sangat mendasar. Kedua hal ini merupakan pilar utama, khususnya struktur dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang akuntabel dan akurat (Khaerunisa et al., 2024).

Penerapan standar akuntansi berbasis syariah kemungkinan akan meningkatkan kualitas tata kelola di dalam Lembaga Keuangan syariah dengan cara yang mencatat semua transaksi secara adil dan akuntabel dengan laporan keuangan yang transparansi (Khairatunisa et al., 2025). Laporan Keuangan dalam sistem keuangan Islam berbeda dari yang ada dalam sistem keuangan konvensional, dan mereka memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Laporan keuangan merupakan dasar dari hasil prosedur akuntansi yang berguna untuk media komunikasi keuangan (Tadjuddin Malik et al., 2024). Laporan keuangan harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu ketepatan waktu, keandalan, dan kemampuan untuk dibandingkan (Dewi & Widarto, 2024). Secara fundamental, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, laporan ini memberikan informasi tentang posisi keuangan, profitabilitas, dan tingkat kepatuhan oleh Lembaga Islam terhadap prinsip-prinsip syariah.

Informasi di dalamnya tidak hanya menarik bagi investor, namun pula untuk pelanggan, otoritas pengatur, dan masyarakat umum yang ingin yakin bahwa operasi Lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah syariah (Yuniar et al., 2024). Penyusunan laporan keuangan dalam sistem keuangan syariah dipandu oleh kerangka prinsip yang sama sekali berbeda dari yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah didasarkan pada ketentuan hukum syariah ditambah dengan prinsip-prinsip moral Islam yang membentuk kerangka operasional seluruh sistem (Zulfa et al., 2023). Namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi, membuktikan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum mencapai harapan pelaku kepentingan sejauh menyangkut keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas laporan keuangannya.

Seperti yang tercantum dalam penelitian (Hidayat & Sari, 2020), beberapa laporan keuangan syariah di Indonesia ditemukan tidak melaporkan laporan keuangannya secara transparan yang secara langsung bertanggung jawab atas jatuhnya kepercayaan publik. Selain itu menurut (Rahman & Ali, 2021; Tadjuddin Malik et al., 2024), bahwa akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah yang buruk karena laporan keuangan disusun berdasarkan hasil kegiatan akuntansi dikaitkan dengan kejelasan informasi dan mekanisme akuntabilitas manajemen. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pelaporan ESG dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi institusional. Laporan keuangan merupakan dasar dari hasil prosedur akuntansi yang berguna untuk media komunikasi keuangan (Tadjuddin Malik et al., 2024).

Kesenjangan dalam penelitian ini yaitu, sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Sari, 2020) terungkap bahwa beberapa lembaga keuangan syariah telah gagal menerapkan prinsip transparansi dan pelaporan laporan keuangan, dan terjadi penurunan tingkat kepercayaan dan menurut (Rahman & Ali, 2021) menyimpulkan bahwa aspek akuntabilitas masih belum bisa yang diharapkan, terutama mengenai kejelasan dan ketepatan informasi yang diungkapkan. Standar yang harus dicapai dalam pelaporan keuangan syariah meliputi transparansi data, akuntabilitas tinggi, dan

kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Laporan tersebut harus mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu, kurangnya akuntabilitas manajemen, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan oleh perusahaan, yang menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan publik.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa tindakan yang disarankan, seperti meningkatkan pelatihan bagi praktisi keuangan dan akuntansi syariah, standar pelaporan yang lebih sistematis dan jelas, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya melengkapi keperluan informasi, namun hal tersebut juga mencerminkan etika dan kepatuhan terhadap sistem ekonomi syariah, sejalan dengan aspirasi masyarakat yang memegang nilai-nilai syariah (Yuniar et al., 2024).

Dalam upaya untuk mengembangkan konsistensi dalam praktik akuntansi syariah di seluruh dunia, pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) digunakan untuk mengembangkan pedoman tentang proses pengukuran, pengakuan, dan pelaporan laporan keuangan yang berbeda oleh Lembaga Keuangan syariah di berbagai negara (Azifah & Fitroh, 2022). Meskipun akuntansi syariah sedang dibangun sebagai komponen integral dari sistem keuangan Islam, penerapannya pada tingkat operasional masih menghadapi banyak rintangan. Beberapa di antaranya melibatkan kurangnya konsistensi dalam penerapan standar, mekanisme pengawasan yang lemah, dan perbedaan antara pelaporan keuangan dan kondisi Lembaga yang sebenarnya secara transparan. Sebagian besar Lembaga Keuangan syariah terus berjuang untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam penuh dalam praktik akuntansi mereka, dan dengan demikian upaya untuk meningkatkan transparansi belum tercapai ke tingkat yang diinginkan.

Oleh Karena itu, di perlukan kajian mendalam untuk menilai kontribusi akuntansi syariah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam penyusunan laporan keuangan secara lebih efektif (Khairatunisa et al., 2025). Dalam konteks ini, peneliti perlu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik utama dari laporan keuangan syariah serta bagaimana karakteristik tersebut berpengaruh terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menjaga kedua prinsip ini juga perlu dianalisis, mengingat kompleksitas dan dinamika yang ada dalam industri keuangan syariah. Dengan mempertimbangkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep tersebut serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah yang lebih baik dan menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

LANDASAN TEORI

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Menurut (Budi, 2021), teori stakeholder atau pemangku kepentingan membahas bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya operasional perusahaan. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa perusahaan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus mempertimbangkan keberadaan dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat. Setiap pemangku kepentingan dianggap memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mulai dikenal sejak tahun 1970-an, dengan gagasan utama bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Dalam pelaporan keuangan syariah, teori ini memperhatikan fakta bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting sebagai tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, tidak hanya investor, tetapi juga mereka yang memiliki kepedulian terhadap prinsip-prinsip syariah.

Laporan keuangan syariah yang akuntabilitas dan transparan mencerminkan nilai-nilai Islam mengenai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Oleh karena itu, pendekatan teori pemangku kepentingan sangat relevan karena beresonansi dengan tanggung jawab sosial dan agama lembaga keuangan syariah dalam menyajikan informasi yang transparan, kredibel, dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Ayuba et al., 2020). Ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan menikmati hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dipandang sebagai elemen yang baik dari tata kelola syariah yang efektif. Indikator kualitas pelaporan keuangan Syariah antara lain kepatuhan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan masyarakat sebagai komponen tanggung jawab spiritual menurut literatur akuntansi Islam.

Pada tingkat lingkungan internal laporan berkualitas ditandai dengan kemampuan sumber daya manusia, struktur pengendalian internal, dan budaya tata kelola yang menyerap nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Penelitian mengenai lembaga keuangan Syariah Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan representatif (keseluruhan dan ketepatan informasi) masih sering menjadi aspek yang lebih lemah. Namun pada tingkat lingkungan eksternal, otoritas dan pemangku kepentingan eksternal telah mengenalkan standar seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) dan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang memerlukan pelaporan transparansi. Maka pada penelitian ini, teori stakeholder menawarkan kerangka konseptual yang kuat dalam membahas nilai pelaporan keuangan syariah, tidak hanya untuk memkasimalkan keuntungan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempertahankan prinsip-prinsip Islam (Yusoff & Rizal Haniffa, 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian, tema, atau fenomena tertentu. proses SLR mencakup tiga tahap utama: perencanaan, implementasi, dan penyampaian hasil evaluasi (Saputra et al., n.d.). Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh para peneliti dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak artikel

telah membahas tentang seberapa transparannya laporan keuangan syariah dan akuntabilitas. Fokus utama dari penelitian ini adalah menentukan apakah akuntansi dalam laporan keuangan syariah transparansi dan akuntabilitas dalam tinjauan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar transparan dan akuntabilitas laporan keuangan syariah dalam sebuah perusahaan. Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) yang membantu memfokuskan hasil pencarian agar sesuai tujuan riset.

Alur Penelitian Systematic Literature Review (SLR)



- **Perencanaan Review**

Fase awal dari tinjauan literatur sistematis (SLR) adalah perancangan tinjauan sistematis menyusun tujuan riset, merumuskan pertanyaan penelitian, dan memilih kata kunci yang relevan.

- **Identifikasi Literatur**

Pencarian data dilakukan Google Scholar, menggunakan kata kunci: “transparansi”, “akuntabilitas”, dan “laporan keuangan syariah” dengan rentang tahun 2020-2025.

- **Seleksi dan Penyaringan**

Menghapus duplikasi, menilai kelayakan berdasarkan judul dan abstrak, hingga penyaringan full text yang memenuhi kriteria inklusi.

- **Analisis Data**

Fase analisis data penelitian adalah tahap pengolahan dan pemahaman data yang dikumpulkan. Analisis dalam tinjauan literatur dianalisis menggunakan spider diklasifikasi berdasarkan topik utama, hasil, dan kontribusi penelitian.

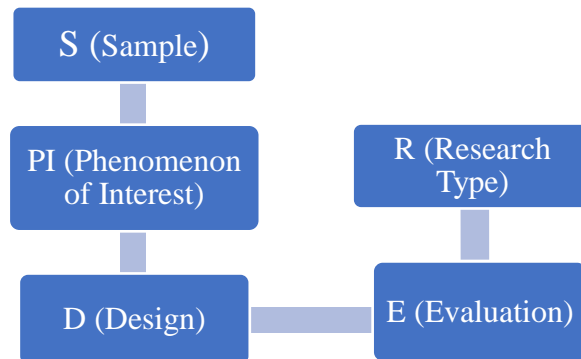
- **Pelaporan dan Sintesis**

Menyusun temuan-temuan kunci berdasarkan pendekatan tematik, dilengkapi narasi dan visualisasi.

Selanjutnya, Analisa data yang dilakukan pendekatan SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evulation, Research type) yang mengelompokkan dan menganalisis literatur secara mendalam dan terarah. Beberapa langkah penting termasuk menentukan kelayakan penelitian, mengidentifikasi sumber data, memilih artikel, menetapkan kriteria inklusi. SLR memungkinkan peneliti menyusun informasi secara sistematis berdasarkan kriteria inklusi. Pencarian artikel ini dilakukan melalui dua langkah utama. pertama kami menelusuri artikel ilmiah menggunakan kata kunci “transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah: Tinjauan Sistematis “dengan fokus pada publikasi antara tahun 2020 sampai 2025. kami melakukan penyaringan lebih detail dengan memilih hasil dari penelusuran sebelumnya

berdasarkan kriteria tambahan yaitu artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kami proses ini melibatkan pemeriksaan judul, abstrak, serta keseluruhan isi artikel (Hendri & Sari, 2023).

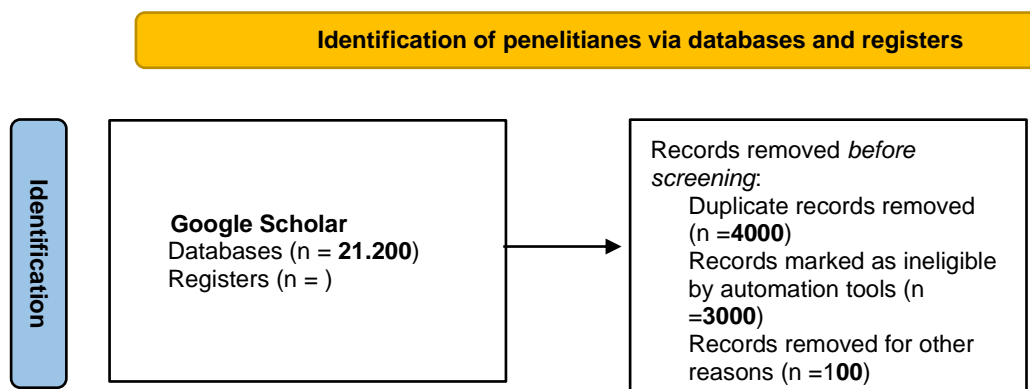
Proses Analisis Data Menggunakan SPIDER

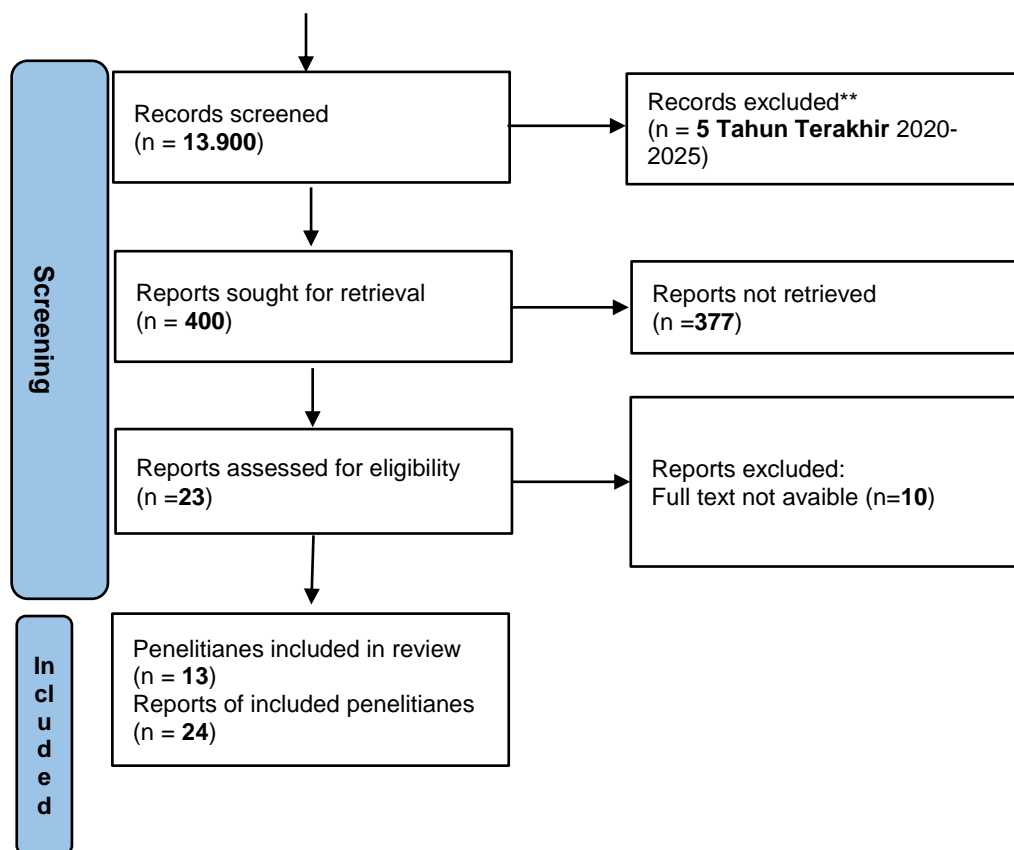


- **S (Sample)** : Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia.
- **PI (Phenomenon of Interest)** : fokus utama studi ini adalah fenomena Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah.
- **D (Design)** : penelitian menggunakan Kajian literatur, pendekatan konseptual dan empiris. Berarti bahwa data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari teori-teori yang sudah ada serta hasil penelitian yang relevan.
- **E (Evaluation)** : Penilaian berbasis dimensi akuntansi syariah, kepatuhan prinsip syariah, dan kinerja laporan keuangan
- **R (Research Type)** : Studi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan utama deskriptif analitis. Data yang diperoleh tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga secara mendalam untuk memahami hubungan antar variabel serta gambaran secara menyeluruh.

Penelitian Terdahulu

Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai artikel dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar yang berjumlah 21.200 artikel yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan syariah dan mendapatkan 23 artikel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam penelitian terdahulu yang terdiri dari pemilihan, penyaringan, dan pengumpulan artikel penelitian terdahulu menggunakan bantuan PRISMA flow diagram untuk memperoleh data yang terkait dengan topik ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.





Setelah berhasil mengumpulkan serangkaian artikel tentang topik wacana, penulis melanjutkan untuk melakukan kajian yang cermat dan terperinci dalam rangka menganalisis konsep pembagian risiko dari segi latar belakang keuangan syariah. Berdasarkan hasil pendalaman literatur yang telah dibahas sebelumnya, tampaknya ada dua gagasan utama yang muncul dalam mencapai peran dan konsekuensi dari pembagian risiko. Sudut pandang pertama tercemin dalam temuan 23 penelitian sebelumnya yang umumnya merangkum bahwa ada potensi keuntungan dalam penggunaan pembagian risiko. Menurut sudut pandang ini, pembagian risiko dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ketimpangan informasi yang biasanya ada antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dicapai karena pembagian risiko mempromosikan peningkatan akuntabilitas, transparansi dalam pengaturan bagi hasil, serta pelaporan keuangan berbasis realisasi aktual, daripada asumsi atau perkiraan.

Dari sisi lain terdapat kedua berasal dari 13 penelitian ini yang justru menyentuh sisi lain dari pembagian risiko dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah munculnya asimetri informasi. Disebabkan beberapa alasan salah satunya, keterbatasan mekanisme pengawasan pengelolaan dana, munculnya risiko moral hazard (penyalahgunaan tanggung jawab oleh manajer) dan kurangnya jaminan bahwa pengungkapan keuangan dilakukan secara terbuka oleh manajer dana, dalam hal ini mudharabah. Dengan memahami kedua perspektif tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan yang komperhensif tentang hubungan antara mekanisme pembagian risiko, transparansi pelaporan keuangan, dan asimetri informasi dalam sektor perbankan syariah. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil analisis dalam berbagai artikel yang

telah dipelajari sebelumnya. Demi memberikan gambaran yang lebih sistematis dan meningkatkan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pendekatan SLR dan analisis literatur yang dilakukan, terdapat sejumlah temuan penting yang memperlihatkan realitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah. Penelitian ini mengkaji 23 artikel terpilih yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 hingga 2025). Dari literatur tersebut, peneliti menemukan lima fokus utama yang menggambarkan kondisi aktual dan tantangan dalam praktik pelaporan keuangan syariah.

Konsep Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Akuntansi Syariah : Perspektif Teori Stakeholder (Teori Pemangku Kepentingan)

Menurut (Budi, 2021), teori stakeholder atau pemangku kepentingan membahas bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya operasional perusahaan. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa perusahaan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus mempertimbangkan keberadaan dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat. Setiap pemangku kepentingan dianggap memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mulai dikenal sejak tahun 1970-an, dengan gagasan utama bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Perusahaan sendiri tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan individu, tetapi sebagai institusi yang harus mampu memenuhi harapan banyak pihak termasuk investor, karyawan, masyarakat, hingga konsumen.

Karena itu, tindakan dan keputusan bisnis perusahaan sangat dipengaruhi oleh aspirasi para pemangku kepentingan ini, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Suryani, 2022). Untuk menjawab tantangan dalam institusi keuangan syariah, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal penting dalam penerapan laporan keuangan syariah. Sebagian besar lembaga keuangan syariah telah menunjukkan niat baik dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan terbuka. Namun, kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih bersifat parsial dan belum konsisten. Banyak laporan keuangan syariah yang belum menampilkan seluruh informasi secara menyeluruh, khususnya dalam hal pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana lembaga-lembaga tersebut berkomitmen terhadap nilai-nilai akuntabilitas yang menjadi dasar etika Islam.

Tak jarang ditemukan bahwa informasi penting tidak dilaporkan secara memadai atau bahkan dihilangkan karena alasan administratif. Transparansi yang seharusnya menjadi jembatan kepercayaan antara lembaga dan pemangku kepentingan justru terkadang terhambat oleh kepentingan birokrasi internal atau kurangnya kapasitas manajerial dalam menyajikan laporan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan terbuka, mulai dari

jumlah modal yang diberikan oleh shahibul mal, skema pembagian keuntungan, hingga potensi risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah agar seluruh proses keuangan perusahaan atau lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sekaligus membangun rasa percaya dari para pemangku kepentingan terhadap sistem yang diterapkan, karena itu pengelola dana dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang terbuka dan jujur (Karjunu Dt. Maa, 2021).

Di Lembaga Keuangan Syariah, transparansi dan akuntabilitas tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Transparansi berarti lembaga terbuka dalam menyajikan informasi keuangan secara jelas, akurat, dan tepat waktu, agar para pemangku kepentingan seperti muzakki, mustahik, regulator, maupun masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja lembaga secara adil. Sementara itu, akuntabilitas menekankan bahwa tanggung jawab lembaga tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT, terutama dalam memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai prinsip syariah (maqāṣid al-syarī'ah).

Ketika kedua prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka bukan hanya integritas lembaga yang terjaga, tetapi juga tumbuh kepercayaan publik dan kepastian bahwa setiap kebijakan keuangan membawa manfaat nyata bagi umat (Lubis et al., 2023). Untuk menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah, dibutuhkan kerangka pelaporan yang jelas serta standar akuntansi yang terstruktur, seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Standar ini tidak hanya memberikan pedoman teknis penyusunan laporan keuangan berdasarkan substansi ekonomi dari transaksi, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, audit syariah berperan penting sebagai instrumen verifikasi yang menjamin bahwa seluruh proses pelaporan keuangan telah memenuhi kaidah syariah secara menyeluruh baik dari sisi legal formal maupun substansi etika Islam. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti publikasi laporan keuangan melalui situs web, media sosial, dan sistem pelaporan daring dapat memperluas akses informasi, mempercepat komunikasi, serta memperkuat kredibilitas lembaga di hadapan publik (Asupa et al., 2025). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini sejalan erat dengan Teori Stakeholder, yang menekankan bahwa lembaga harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemilik modal. Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah, para stakeholder mencakup muzakki, mustahik, investor, regulator, hingga masyarakat luas.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana, baik komersial maupun sosial harus menjadi prioritas. Hal ini menuntut tersedianya sumber daya manusia yang tidak hanya profesional di bidang akuntansi syariah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan spiritual Islam. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kepercayaan publik terhadap institusi akan meningkat, tata kelola keuangan menjadi

lebih efektif, dan tujuan syariah dalam menciptakan keadilan sosial ekonomi dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, penguatan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi merupakan bentuk nyata dari pemenuhan tanggung jawab lembaga terhadap para pemangku kepentingan (Yuniar et al., 2024).

Karakteristik Laporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Salah satu ciri yang membuat laporan keuangan syariah berbeda secara fundamental dengan laporan konvensional adalah fokusnya pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Tidak sekadar menyajikan angka dan neraca, laporan keuangan syariah memuat unsur etika, tanggung jawab sosial, serta integritas lembaga di mata Allah dan masyarakat. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan amanah menjadi fondasi dalam proses penyusunan dan pelaporan. Hal ini juga tercermin dalam sistem bagi hasil yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang mendorong transparansi dalam distribusi keuntungan dan risiko. Hal ini berbeda dari sistem bunga pada lembaga konvensional yang seringkali menyembunyikan risiko di balik jaminan return tetap. Selain itu, pelaporan dana sosial (zakat, infak, sedekah) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada akuntabilitas sosial dan kebermanfaatan umat.

1. Pendekatan Berbasis Nilai Etika dan Moral

Berbeda dari laporan keuangan konvensional yang berfokus pada pencapaian keuntungan finansial melalui data kuantitatif, laporan keuangan syariah mengedepankan prinsip moral dan etika Islam dalam setiap pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan amanah menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan, karenanya menghasilkan informasi yang bukan hanya akurat sebagai finansial, tetapi juga etis dan bertanggung jawab.

2. Komitmen terhadap Larangan Unsur Haram

Salah satu prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah adalah larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Setiap elemen yang dilaporkan dalam sistem keuangan syariah harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hal ini secara langsung menciptakan batasan yang jelas dalam pengakuan dan pengukuran transaksi, yang pada akhirnya meningkatkan kejelasan dan integritas informasi keuangan.

3. Orientasi Terhadap Kesejahteraan Sosial

Laporan keuangan syariah bukan hanya bermaksud memberikan gambaran kondisi keuangan lembaga, melainkan juga mengevaluasi sejauh mana lembaga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pelaporan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang menjadi bagian integral dari sistem akuntansi syariah. Dengan demikian, laporan ini memperluas fungsi pelaporan keuangan dari sekadar evaluasi kinerja ekonomi menjadi instrumen akuntabilitas sosial.

4. Tujuan dan Fungsi Pelaporan yang Lebih Terintegrasi

Jika laporan keuangan konvensional ditujukan terutama untuk memberikan informasi kepada investor dan pemilik modal, laporan keuangan syariah dirancang untuk membuktikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah serta memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi

informasi tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial lembaga.

5. Sistem Distribusi Keuntungan yang Adil

Berbeda dari sistem konvensional yang cenderung berbasis bunga (interest-based), laporan keuangan syariah mencerminkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan awal para pihak. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan keadilan ekonomi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaporan hasil usaha (Shafa & Firdaus, 2025).

Dalam dunia keuangan, terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, terutama dalam penerapan laporan keuangan. Laporan keuangan syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang secara tegas melarang keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Selain pelaporan kinerja keuangan, laporan keuangan syariah juga menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab etis perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan syariah tidak hanya merefleksikan keuntungan dan kerugian, tetapi juga tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah serta dampak sosial dari kegiatan operasionalnya.

Sebaliknya, laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi umum yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia atau International Financial Reporting Standards (IFRS) secara global (Turrahmi & Sentiyani, 2024). Fokus utama laporan ini terletak pada aspek efisiensi operasional dan pencapaian profitabilitas, tanpa mempertimbangkan dimensi etika atau prinsip moral keagamaan dalam proses bisnis. Secara umum, perbedaan mendasar antara laporan keuangan syariah dan konvensional terletak pada jenis transaksi yang diakui serta pendekatan terhadap nilai-nilai moral dalam penyajian laporan. Sebagai contoh, laporan keuangan syariah secara khusus mengidentifikasi dan memisahkan transaksi yang mengandung unsur bunga, serta menyajikan informasi yang menunjukkan sejauh mana lembaga mematuhi ketentuan hukum Islam (Hutabarat & Firdaus, 2025).

Tabel 1. Perbedaan Laporan Keuangan Syariah dan Konvensional

Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan Laba/Rugi	2. Laporan Laba/Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait	5. Catatan Atas Laporan Keuangan
6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	
7. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Zakat	
8. Laporan dan Penggunaan Dana Kebajikan	

Laporan keuangan syariah disusun sebagai pengungkapan formal posisi keuangan dan kinerja lembaga yang dipandu oleh prinsip-prinsip syariah. Tujuan mendasar dari penyajian laporan ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna sehubungan

dengan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas lembaga Islam sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan ekonomi di pihak pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, PSAK 101 berperan penting sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan syariah. Standar ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga syariah dalam menyusun laporan keuangan, termasuk struktur laporan dan isi minimum yang diperlukan. Dalam konteks akuntansi syariah, khususnya pada Lembaga Keuangan syariah, laporan keuangan memiliki struktur khusus yang bermaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta penggunaan dana berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah komponen-komponen utama yang wajib disajikan (Firdaus & Hidayat, 2024):

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini menggambarkan informasi mengenai aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas lembaga pada periode waktu tertentu. Laporan ini mencerminkan transparansi dalam kepemilikan dan tanggung jawab keuangan, serta membantu pengguna laporan dalam mengevaluasi stabilitas keuangan lembaga.

2. Laporan Surplus atau Defisit Underwriting Dana Tabarru

Laporan ini bersifat unik dalam akuntansi syariah karena mencerminkan hasil kegiatan operasional dana tabarru', yaitu dana yang dikumpulkan untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta. Laporan ini mendukung prinsip akuntabilitas atas dana milik peserta yang tidak boleh dicampur dengan dana perusahaan.

3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Laporan ini menggambarkan kinerja keuangan lembaga secara keseluruhan, termasuk: Pendapatan dari jasa pengelolaan, Beban operasional, Keuntungan atau kerugian investasi, Penghasilan komprehensif lain seperti keuntungan revaluasi aset atau selisih kurs. Laporan ini penting untuk menunjukkan kemampuan lembaga dalam menghasilkan keuntungan secara halal dan efisien.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menguraikan perubahan dalam ekuitas selama rentang waktu tertentu, termasuk: Laba ditahan, Modal disetor, Pembagian hasil kepada pemilik dana (jika ada), Komponen ekuitas lainnya. Transparansi dalam laporan ini mencerminkan bagaimana lembaga mengelola hak pemilik dan bagaimana nilai lembaga berkembang.

5. Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan gambaran pergerakan aliran masuk dan keluar kas selama satu periode, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: Arus kas dari aktivitas operasional, Aktivitas investasi, Aktivitas pendanaan. Laporan ini memungkinkan pengguna memahami likuiditas dan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini menyajikan informasi mengenai: Pengumpulan dana zakat dari lembaga atau pihak ketiga, Penyaluran zakat kepada mustahik (penerima yang berhak). Laporan ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan lembaga terhadap kewajiban keagamaan dalam Islam.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan (charity fund) berasal dari sumber-sumber seperti denda syariah (gharamah), hibah, atau sisa dana non-halal. Dana ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis, melainkan untuk tujuan sosial. Laporan ini mencerminkan amanah pengelolaan dana non komersial secara etis dan sesuai syariah.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini memberikan penjelasan rinci dan tambahan atas angka-angka dalam laporan utama. Informasi ini meliputi: Kebijakan akuntansi yang digunakan, Rincian transaksi syariah, Penjelasan atas pos-pos signifikan. Catatan ini memperkuat aspek transparansi dan membantu auditor serta pengguna laporan memahami konteks dari informasi yang disajikan.

Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penerapan akuntansi syariah dalam sistem keuangan modern merupakan upaya strategis untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, implementasi akuntansi syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun beberapa tantangannya antara lain:

1. Belum adanya keseragaman standar akuntansi syariah secara global.

Benar bahwa organisasi internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sudah menetapkan standar-standar akuntansi yang dirancang spesifik untuk Lembaga Keuangan syariah. Namun situasi di lapangan menunjukkan bahwa praktis penerapan standar-standar tersebut masih belum merata di semua negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Beberapa negara mengadaptasi standar tersebut secara penuh, sementara negara lain memilih untuk menyesuaikannya dengan kondisi lokal, atau bahkan tetap menggunakan standar akuntansi konvensional dengan modifikasi terbatas. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan syariah, yang dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, dan perbandingan antar lembaga keuangan di tingkat internasional.

2. Keterbatasan pemahaman konseptual dan teknis, serta sumber daya manusia yang memadai dalam bidang akuntansi syariah.

Sebelumnya terdapat banyak Lembaga keuangan, khususnya di negara-negara berkembang, yang belum memiliki tenaga profesional yang sebenarnya mengerti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan implikasinya terhadap praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, ketersediaan pelatihan dan pendidikan formal yang mengintegrasikan ilmu akuntansi modern dengan prinsip syariah juga masih terbatas. Kurangnya kapasitas ini berdampak pada lemahnya implementasi sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan standar internasional.

3. Transaksi-transaksi keuangan dalam sistem syariah sering kali memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Hal ini terutama terlihat dalam akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana sistem bagi hasil dan risiko ditentukan secara proporsional dan bergantung pada kinerja usaha. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga tetap, sistem syariah mengharuskan penghitungan keuntungan secara riil, yang menuntut ketelitian dalam pencatatan transaksi, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, proses pengakuan pendapatan dan penyesuaian nilai aset di beberapa akad-akad sudah sangat banyak menyebabkan diskusi antara para praktisi dan para ulama sehingga mustahil dilupakan tanpa telaah dan pemahaman mendalam dari para akuntan syariah (Shafa & Firdaus, 2025).

Secara keseluruhan, kesuksesan penerapan akuntansi syariah tidak hanya bergantung pada adanya standar yang tepat, tetapi juga sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kematangan sistem teknologi informasi pendukung, serta keselarasan antara regulasi nasional dan standar internasional. Sehingga, sinergi antara Lembaga pendidikan, regulator, praktisi keuangan, dan Lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam memacu kemajuan dan konsistensi praktik akuntansi syariah di berbagai belahan dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sistem keuangan syariah, terwujudnya sistem keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga selaras dengan nilai-nilai integritas dan keterbukaan sangat di tekankan. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan keuangan syariah yang masih belum memenuhi standar mengenai transparansi dan tanggung jawab laporan keuangan syariah. Hal ini menyoroti pentingnya mengikuti nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan akses informasi yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan. Perpaduan etika dan transparansi ini menciptakan sistem keuangan yang adil, jujur, dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi islam tentang masyarakat yang seimbang dan adil Dalam islam, akuntabilitas berarti lebih dari sekadar tanggung jawab duniawi. Ini juga melibatkan kewajiban langsung kepada Allah. Akuntabilitas ini melampaui alam spiritual dan ditunjukkan melalui tindakan dan sistem nyata bertujuan untuk menyenangkan. Maka dari itu untuk menjalankan sebuah bisnis, etika harus selalu diutamakan sebagai bukti tanggung jawab kepada tuhan. Membangun kapasitas sumber daya manusia profesional keuangan islam membutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip akuntansi islam.

Untuk membangun konsistensi dan tanggung jawab dunia, lembaga keuangan syariah harus terus merangkul dan menerapkan standar pelaporan di seluruh dunia yang ditetapkan oleh AAOIFI. Penggunaan teknologi informasi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi membantu pemangku kepentingan mendapatkan akses ke data serta meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Meningkatkan sistem pengawasan dan audit syariah untuk menjamin bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan keadaan aktual lembaga. Riset pembangunan berkelanjutan untuk menawar saran kebijakan yang relevan bagi regulator dan praktisi, studi akademis dan penelitian lebih lanjut tentang masalah dan solusi penerapan akuntansi syariah harus terus dikembangkan, diharapkan dengan mengikuti rekomendasi tersebut laporan keuangan lembaga keuangan syariah menjadi alat utama untuk membangun kepercayaan publik dan membangun sistem keuangan syariah yang kredibel terbuka, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asupa, R., Lilih Rahmawati, Carmidah, W., & Dwi Swandini. (2025). *Peningkatan Kompetensi Akuntansi Siswa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Syariah dan Konvensional di MAN 1 Lampung Timur*. 6(1), 486–492.
- Ayuba, H., Lilian Onuoha, & Muhammad Nuhu. (2020). Teori pemangku kepentingan dan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Penelitian Bisnis Islam*, 3(11), 485–498.
- Azifah, N., & Fitroh, K. (2022). Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 138–150.

<https://doi.org/10.56127/jaman.v2i3.499>

- Budi, I. S. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) disclosure and Islamic Banks (IBs) performance: The application of stakeholder theory from Islamic perspective*. 25(June).
- Dewi, S., & Widarto, W. (2024). Literatur review transparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade: Studi bibliometric. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6(06), 207–216.
- Firdaus, R., & Hidayat, R. (2024). *Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Lembaga Keuangan Islam Implementation Of Shariah Accounting In Improving Financial Transparency And Accountability In Islamic*. 9152–9155.
- Hendri, N., & Sari, S. U. (2023). Systematic Literature Review: The Strategy For Preventing Government Financial Report Fraud. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 323–336. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.6599>
- Hidayat, & Sari. (2020). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Urnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 123–135.
- Hutabarat, N. C., & Firdaus, R. (2025). *Masa Depan Akuntansi Syariah Dalam Bisnis Modern*. 10017–10031.
- Kamal, M., Sagala, A., & Kunci, K. (2025). *Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah*. 8(1), 307–317.
- Karjunu Dt. Maa. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Khaerunisa, A., Fatmasari, D., & Ahdi, M. (2024). *Penyajian Laporan Keuangan , Aksesibilitas Laporan Keuangan , Pengendalian Internal , dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes*. 2(2), 338–346.
- Khairatunisa, R., Yasika Rahma Aulia, Zelika Salsa Kayla, & Peny Cahaya Azwari. (2025). *Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Lembaga Zakat dan Wakaf*. 2(1).
- Lubis, N. R., Balqis, T., & Nurlaila. (2023). Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1145–1154.
- Rahman, & Ali. (2021). Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Syariah: Tinjauan Empiris. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 45–46.
- Rahmatilla, F. Y., & Ali, A. H. (2024). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syari ' ah di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo*. 02(02), 41–56.
- Saputra, F. R., Jailani, M. I., & Gunawan, A. (n.d.). *Analisis Penerapan Financial Technology Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah*. 4(1), 57–65.
- Shafa, A., & Firdaus, R. (2025). *Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi Dynamics Of The Development Of Islamic Accounting Principles : Accounting Theory As A Pillar Of*. 9375–9387.
- Suryani, L. (2022). Kinerja Bank Syariah : Pengungkapan ICSR Berdasarkan Teori Stakholder Dari Perspektif Islam. *Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 478–486.
- Tadjuddin Malik, D. H., Fahmi, M. H. M. N., Firdaus, S. E. N., & Husain, S. H. A. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah Teori Dan Praktik* (M. A. Dr. H. Husain, S.Ag. (ed.); kedua). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Turrahmi, M. K. A. A. M. F., & Sentiyani, R. R. S. (2024). *Analysis Of Differences In The*

Implementation Of Accounting In Syariah Banks And Conventional Banks. November, 8576–8585.

Yuniar, H. S., Sisdiyanto, E., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah: Meningkatkan Transparansi Dan Kesejahteraan.* 2(12).

Yusoff, H., & Rizal Haniffa. (2021). Tata kelola syariah, tata kelola perusahaan, dan pelaporan keberlanjutan bank Islam: Bukti dari Asia Tenggara. *Jurnal Internasional Akuntansi & Manajemen Informasi*, 2(27), 230–252.

Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>